

**KEWENANGAN ORGANISASI PERBAKIN  
DALAM MEMBERIKAN IZIN KEPEMILIKAN  
SENJATA API DITINJAU BERDASARKAN  
PRESPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Muhammad Alfisyahri Subakti  
180710016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

**KEWENANGAN ORGANISASI PERBAKIN  
DALAM MEMBERIKAN IZIN KEPEMILIKAN  
SENJATA API DITINJAU BERDASARKAN  
PRESPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
Muhammad Alfisyahri Subakti  
180710016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Alfisyahri Subakti  
NPM : 180710016  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

**KEWENANGAN ORGANISASI PERBAKIN DALAM MEMBERIKAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API DITINJAU BERDASARKAN PRESPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** Adalah benar hasil karya sendiri dan menyatakan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Semua naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah ataupun pendapat yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang atau pihak lain, kecuali dikutip secara resmi didalam naskah ini serta dicantumkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dikemudian hari di dalam naskah Skripsi ini terdapat unsur-unsur PLAGIASI yang dapat dibuktikan, maka terhadap naskah Skripsi ini saya bersedia untuk digugurkan begitu juga terhadap gelar akademik yang saya peroleh dapat dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 15 Juli 2024



Muhammad Alfisyahri Subakti

NPM. 180710016

**KEWENANGAN ORGANISASI PERBAKIN DALAM  
MEMBERIKAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API  
DITINJAU BERDASARKAN PRESPEKTIF PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:  
Muhammad Alfisyahri Subakti  
180710016**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini:**

**Batam, 15 Juli 2024**



**Diki Zukriadi, S.H.,M.H.,M.Kn  
Pembimbing**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam perlindungan hukum terkait pemberian kewenangan perbakin dalam memberikan izin tembak bagi masyarakat. Meskipun masyarakat sipil telah mendapatkan izin resmi, kepemilikan senjata api tetap menimbulkan berbagai potensi ancaman dan risiko yang memerlukan regulasi dan pengawasan ketat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kajian terhadap literatur hukum dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api, serta peraturan lainnya yang mengatur prosedur perizinan, syarat-syarat kepemilikan, dan pengawasan penggunaannya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab dan risiko kepemilikan senjata api juga perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan tanggung jawab kepemilikan senjata api berizin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kepemilikan senjata api berizin oleh masyarakat sipil dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Kewenangan, Organisasi, Izin, Senjata Api

## **Abstract**

*This study aims to evaluate the government's role in legal protection related to the authorization of perbakin to provide firearm licenses for the public. Although civilians have obtained official licenses, firearm ownership still poses various potential threats and risks that require strict regulation and supervision. This research uses a normative juridical approach and the method of analyzing relevant laws and regulations, as well as a review of relevant legal and policy literature. The results show that the government has established comprehensive regulations to govern the ownership and use of firearms by civilians. These regulations include Law No. 12/1951 on Firearms and Explosives, National Police Chief Regulation No. 18/2015 on Firearms Licensing, Supervision, and Control, as well as other regulations governing licensing procedures, conditions of ownership, and supervision of their use. However, implementation in the field still faces various challenges, such as a lack of coordination between related institutions, limited human resources and technology in supervision, and weak law enforcement against violations that occur. In addition, public legal awareness of the responsibilities and risks of firearms ownership also needs to be improved. This study recommends increasing the effectiveness of inter-agency coordination, stricter and more consistent law enforcement, and education to the public regarding the risks and responsibilities of licensed firearms ownership. With these steps, it is expected that legal protection against the threats posed by the ownership of licensed firearms by civilians can be optimally realized.*

*Keywords: Authority, Organization, Permit, Firearms.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-NYA yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husada, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T.,M.Ikom selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
3. Bapak Diki Zukriadi selaku dosen pembimbing skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah sangat banyak memberikan perhatian, dukungan serta kemudahan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen Universitas Putera Batam yang telah memberikan perhatian dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Seluruh staf Universitas Putera Batam yang telah membantu mengelola mahasiswa dari awal kuliah hingga mereka lulus.
6. Kepada Teman-teman seperjuangan yang tempat penulis berbagi dan menimba ilmu pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
7. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini dengan keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan Skripsi penulis berharap masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat menjadi sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata semoga Tuhan membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat-NYA kepada kita.

Batam, 15 Juli 2024



Muhammad Alfisyahri Subakti  
NPM. 180710016

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>iii</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>1.1 Latarbelakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>1.3 Batasan Masalah</b> .....	<b>11</b>
<b>1.4 Rumusan Masalah</b> .....	<b>11</b>
<b>1.5 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>1.6 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1 Kerangka Teoretis</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1.1. Teori Kepastian Hukum</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1.2. Teori Perlindungan Hukum</b> .....	<b>19</b>
<b>2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Senjata api</b> .....	<b>22</b>
<b>2.1.4. Konsep Kewenangan</b> .....	<b>25</b>
<b>2.1.5. Konsep Perizinan</b> .....	<b>29</b>
<b>2.2 Kerangka Yuridis</b> .....	<b>32</b>
<b>2.3 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>33</b>
<b>2.4 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>38</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian</b> .....	<b>39</b>
<b>3.2 Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>39</b>
<b>3.3 Teknik Analisis Data</b> .....	<b>40</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
<b>4.1 HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
<b>4.1.1. Belum jelasnya pedoman hukum yang mengatur kewenangan masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan alat penyengat api</b> .....	<b>42</b>
<b>4.1.2. Eksistensi Kewenangan Organisasi Perbakin Dalam Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api Untuk Masyarakat Sipil</b> .....	<b>44</b>
<b>4.2 PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>
<b>4.2.1. Pengaturan Hukum dalam pemberian izin Senjata Api Oleh Masyarakat</b>	



<b>Untuk Menjaga Kesematan.....</b>	<b>46</b>
<b>4.2.2. Kewenangan Organisasi Perbakin Dalam Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
<b>5.1 SIMPULAN .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>